



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Bagi Tenaga Kependidikan ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta tata cara Pengendalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Tembakau ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) ;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 11) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 2) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 7) ;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 1) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 3) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012 dirinci sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|------------|-----------------------------|
| 1. | Pendapatan Daerah : | | |
| | a. Semula | Rp. | 1.537.694.091.064,00 |
| | b. Bertambah | Rp. | 148.519.061.886,71 |
| | Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan | Rp. | 1.686.213.152.950,71 |
| 2. | Belanja : | | |
| | a. Semula | Rp. | 1.679.631.188.021,35 |
| | b. Bertambah | Rp. | 220.641.828.136,84 |
| | Jumlah Belanja setelah
Perubahan | Rp. | 1.900.273.016.158,19 |

3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	234.518.866.135,35	
2) Bertambah	Rp.	103.220.001.190,13	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		337.738.867.325,48
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	92.581.769.178,00	
2) Bertambah	Rp.	31.097.234.940,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		123.679.004.118,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.		214.059.863.207,48

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	135.696.733.955,00	
2) Bertambah	Rp.	14.677.822.122,89	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		150.374.556.077,89
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	1.195.907.256.818,00	
2) Bertambah	Rp.	78.468.007.360,82	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		1.274.375.264.178,82
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	206.090.100.291,00	
2) Bertambah	Rp.	55.373.232.403,00	
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		261.463.332.694,00
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	29.358.707.600,00	
2) Bertambah	Rp.	1.483.150.425,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		30.841.858.025,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	29.686.614.894,00	
2) Bertambah	Rp.	10.513.985.526,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		40.200.600.420,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	14.050.862.901,00	
2) Bertambah	Rp.	(2.791.189.010,25)	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		11.259.673.890,75

- d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 62.600.548.560,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 5.471.875.182,14 |

Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan

Rp. 68.072.423.742,14

- (3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 341.975.260.818,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 78.468.007.360,82 |

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp. 420.443.268.178,82

- b. Dana Alokasi Umum

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 785.584.826.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | 0,00) |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp. 785.584.826.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus

- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 68.347.170.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 |

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 68.347.170.000,00

- (4). Lain – lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya

- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 48.754.954.791,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 5.157.779.903,00 |

Jumlah Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Peruban

Rp. 53.912.734.694,00

- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 123.936.405.500,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 57.161.252.500,00 |

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan

Rp. 181.097.658.000,00

- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33.398.740.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (6.945.800.000,00) |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

Rp. 26.452.940.000,00

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 975.977.954.666,35
 - 2) Bertambah Rp. 116.642.999.556,74

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.092.620.954.223,09
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 703.653.233.355,00
 - 2) Bertambah Rp. 103.998.828.580,10

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 807.652.061.935,10
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 772.216.575.098,91
 - 2) Bertambah Rp. 55.695.017.960,804

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 827.911.593.059,71
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 4.059.119.130,00
 - 2) Bertambah Rp. (2.500.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 1.559.119.130,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 209.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 209.000.000,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 65.375.120.100,00
 - 2) Berkurang Rp. 6.758.500.900,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 72.133.621.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 40.012.233.703,00
 - 2) Bertambah Rp. 8.174.843.154,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 48.187.076.857,00
 - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 1.152.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 1.152.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp.	90.570.600.000,00
2) Bertambah	Rp.	41.520.140.713,71

**Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa setelah
Perubahan**

Rp. 132.090.740.713,71

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	2.383.306.634,44
2) Bertambah	Rp.	6.994.496.828,23

**Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan**

Rp. 9.377.803.462,67

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	66.491.340.740,00
2) Bertambah	Rp.	15.808.197.097,00

**Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan**

Rp. 82.299.537.837,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	337.071.334.329,00
2) Bertambah	Rp.	67.142.946.245,10

**Jumlah Belanja Barang dan
Jasa setelah Perubahan**

Rp. 404.214.280.574,10

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	300.090.558.286,00
2) Bertambah	Rp.	21.047.685.238,00

**Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan**

Rp. 321.138.243.524,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	234.518.866.135,35
2) Bertambah	Rp.	103.220.001.190,13

**Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan**

Rp. 337.738.867.325,48

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	92.581.769.178,00
2) Bertambah	Rp.	31.097.234.940,00

**Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan**

Rp. 123.679.004.118,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran
Sebelumnya

1) Semula	Rp.	214.959.866.135,35
2) Bertambah	Rp.	103.220.001.190,13

**Jumlah Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun Anggaran
sebelumnya setelah Perubahan**

Rp. 318.179.867.325,48

- b. Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.559.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | 0,00 |

**Jumlah Penerimaan Investasi
Jangka Panjang Non Permanen
setelah Perubahan** **Rp. 19.559.000.000,00**

- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 32.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 27.000.000.000,00 |

**Jumlah Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan** **Rp. 59.500.000.000,00**

- b. Pembayaran Pokok Utang
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 35.003.314.900,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 |

**Jumlah Pembayaran Pokok
Utang setelah Perubahan** **Rp. 35.003.314.900,00**

- c. Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 25.078.454.278,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 4.097.234.940,00 |

**Jumlah Pengeluaran Investasi
Jangka Panjang Non Permanen
setelah Perubahan** **Rp. 29.175.689.218,00**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008